

SKRIPSI

**EKSISTENSI PASAL 45 DAN PASAL 49
UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG SUMBER DAYA AIR**



**ELFRIDA
030115239**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**EKSISTENSI PASAL 45 DAN PASAL 49
UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG SUMBER DAYA AIR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



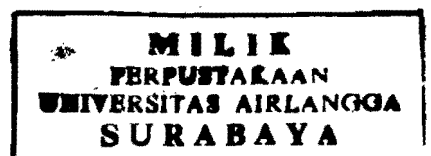
Hj. Romlah Sartono, S.H., M. S.
NIP. 130315289

Penyusun



Elfrida
NIM. 030115239

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Negara Indonesia adalah Negara Pengurus (*Verzorgingsstaat*) yang contohnya terdapat dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Dalam Pasal ini dinyatakan bahwa air dikuasai oleh Negara. Namun Penguasaan ini tidak berarti Pemilikan sebab rakyat Indonesia adalah pemegang hak milik atas air. Konsekuensinya, Pemerintah wajib untuk melestarikan air, menghargai hak asasi masyarakat atas air, melindungi hak asasi tersebut dan memenuhi kebutuhan rakyatnya akan air sebab air adalah benda milik bersama (*public property*).

Saat ini telah dikeluarkan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Munculnya Undang Undang ini menimbulkan kekhawatiran karena eksistensi pasal pasalnya akan memberi peluang bagi privatisasi dan komersialisasi air seperti Pasal 45 dan Pasal 49. Walau demikian bila dikaitkan dengan semangat demokratis, tuntutan kebutuhan masyarakat dan desakan aktor global maka privatisasi dan komersialisasi tidak dapat dielakkan. Yang harus dipahami bahwa Undang Undang Sumber Daya Air yang membuka peluang bagi pihak swasta untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengusahaan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 sebab Pemerintah tetap melakukan fungsi pengaturan dan kebijakan, fungsi pengurusan, pengelolaan dan pengawasan untuk mewujudkan sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

2. Saran

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 maka perlu diadakan pengefektifan oleh Negara dan kekuasaannya untuk menjamin kepastian hak bagi rakyatnya dan pemanfaatan air secara berkesinambungan yang dapat dilakukan diantaranya dengan meningkatkan kemampuan BUMN, BUMD dan Koperasi selaku institusi Pemerintah terkait dengan kemandirian penyediaan air minum.

Lebih lanjut dengan berlakunya Undang Undang Sumber Daya Air maka Pemerintah harus benar – benar melaksanakan wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14, 15 dan 16 UU Sumber Daya Air yaitu melakukan penetapan norma standar pengelolaan sumber daya air dan melaksanakan pengawasan. Pemerintah secara proaktif juga harus lebih selektif dalam menerbitkan ijin hak guna usaha air.

Pengawasan preventif dari masyarakat juga diperlukan guna mengontrol berbagai kebijakan Pemerintah terhadap kebendaan air. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 49 dan Pasal 84 Undang Undang Sumber Daya Air dimana masyarakat diberikan kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya air.

Selain itu pihak aktivis LSM juga dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja badan pemegang hak guna usaha air bahkan melakukan upaya advokasi sebagai wakil masyarakat untuk mengajukan gugatan apabila kegiatan orang atau badan usaha tersebut menyebabkan kerusakan sumber daya air dan/ atau prasarananya (Pasal 90 dan Pasal 92 ayat (1) Undang Undang Sumber Daya Air).